

IMPLEMNTASI PROGRAM KELURGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI

IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM (PKH) IN BOJONGGENTENG DISTRICT, SUKABUMI REGENCY

Muhammad Zaeni Nasihin¹, Muhammad Luthfie^{2*}, Rusliandy³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Bogor 16720

*Korespondensi: Muhammad Luthfie, Email: mluthfie@unida.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian government seeks to tackle poverty problems by issuing a policy, namely the Family Hope Program. The Family of Hope Program is a social protection program through the provision of cash assistance to poor families who meet the predetermined requirements in this case aiming to improve the quality of education, health and community welfare. The purpose of this study is to determine how the implementation of the Family Hope Program in Bojonggenteng District, Sukabumi Regency and the concept of Implementing the Hope Family Program in Bojonggenteng District, Sukabumi Regency. The research method used is descriptive qualitative research method, the focus of the research is communication, resources, dispositions and bureaucratic structures. The technique of collecting data is through literature study, observation and interviews, using data validation using triangulation techniques. The results of this research suggest that the implementation of the Family.Hope Program in the District of Bojonggenteng has not been well implemented. Socialization problems and the existence of social disparities between communities are inhibiting factors in the family hope program in Bojonggenteng district. Therefore, the concept of implementing the family hope program in Bojonggenteng sub-district needs evaluation and re-supervision of all stakeholders involved so that an effective hope family program can be implemented.

Keyword: Policy Implementation, Family of Hope Program

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berupaya untuk penanggulangan masalah kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan . Program Keluarga Harapan yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam hal ini berupa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegtahui bagaimana implementasi Pogram Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi serta konsep Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng kabupaten sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penlitian deskriptif kualitatif, fokus penelitian.adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka observasi dan wawancara dengan menggunakan validasi data menggunakan teknik triangulasi. Dari hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng belum terlaksana dengan baik. Masalah sosialisai dan masih adanya kesenjangan sosial antar masyarakat menjadi faktor penghambat dalam program keluarga harapan di kecamatan bojonggenteng. Maka dari itu konsep implentasi program keluarga harapan di Kecamatan Bojonggenteng perlu adanya evaluasi dan pengawasan kembali dari semua stakeholder yang terlibat sehingga terlaksananya Program Keluarga Harapan yang efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Progaram Keluarga Harap

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan kelanjutan serta upaya peningkatan dari program Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang berlaku sejak 2016 sampai 2030. Dalam hal ini manusia sebagai salah satu yang berkontribusi dalam upaya mencapai kesuksesan *SDGs*, tujuan pertama yang diusung di Indonesia adalah penghapusan kemiskinan pada tahun 2030, dengan mengimplementasikan tindakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin, serta peningkatan akses mereka terhadap layanan dasar (A Iskandar 2:2019).

Untuk pengentasan kemiskinan, maka Pemerintahan Indonesia membuat program penanggulangan kemiskinan yang didasari oleh bantuan sosial dari pemerintah, terdapat suatu program yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial, telah memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan program ini ditangani oleh Dinas Sosial, sebuah instansi pemerintahan yang fokus pada isu-isu sosial. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik dalam rangka perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Salah satu kebijakan sosial yang dibuat pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Kepala Keluarga Miskin yang berada di semua daerah Indonesia, jika mereka memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia, yaitu pendidikan,

kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program PKH dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Kordontur Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan". Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kecamatan Bojonggenteng yang menjadi satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi yang melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2014. Adapun jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bojonggenteng sebanyak 2.700 Kepala keluarga (KK), sedangkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojonggenteng untuk tahun 2020 hanya 1717 Kepala Keluarga. Meskipun program harapan di Kecamatan Bojonggenteng sudah berjalan cukup lama tidak lepas dari permasalahan atau hal-hal yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng yaitu : 70% masyarakat di kecamatan bojonggenteng berada dibawah garis kemiskinan. Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Bojonggenteng yang belum terdaftar menjadi peserta PKH, tetapi upaya dari pemerintah Kecamatan Bojonggenteng terus dilakukan dengan tahun ke tahunnya jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan berupa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jumlah rumah yang tidak layak huni (RUTILAHU) semakin meningkat. Tingkat pendidikan anak-anak masih rendah, terlihat dari adanya anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan mereka. Masih ada lulusan Sekolah Dasar (SD) yang

memilih untuk bekerja daripada melanjutkan ke sekolah, dikarenakan keterbatasan faktor ekonomi, dan hal ini berdampak pada rendahnya kualitas masyarakat Indonesia.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih rinci dengan judul "Penelitian tentang Penerapan Program Keluarga Harapan". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara lebih detail implementasi dan konsep Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi.

Implementasi Kebijakan Publik

Secara ringkas, kebijakan merujuk pada peraturan tertulis dan keputusan resmi yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik di ranah publik maupun pribadi. Menurut Harold Laswell dan Kaplan memberikan definisi kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dan berisikan tujuan-tujuan.

Definisi implementasi terkait erat dengan kebijakan publik. Istilah "implementasi kebijakan publik" mengacu pada aktivitas pelaksanaan atau penyelesaian kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui, dengan menggunakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn menggambarkan implementasi sebagai suatu proses, sehingga proses implementasi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau unit pemerintahan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, yaitu :

1. Komunikasi

2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Program Keluarga Harapan (PKH)

Satu dari kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Sebagai imbalan, rumah tangga yang sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan memiliki fokus yang lebih spesifik dalam membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin, serta sebagai upaya untuk memutus siklus kemiskinan yang telah berlangsung selama ini. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, program serupa ini memiliki manfaat yang signifikan bagi keluarga miskin, terutama bagi mereka yang mengalami kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang.

Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok yang paling miskin. Sasaran program ini meliputi keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Program ini memiliki komponen kesehatan yang mencakup ibu hamil/menyusui dan anak usia nol hingga enam tahun. Selain itu, terdapat komponen pendidikan yang mencakup anak SD/MI, anak SMP/MTs, anak SMA/MA, dan anak usia enam

hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun. Pada tahun 2016, program ini juga menambahkan komponen kesejahteraan sosial dengan fokus pada lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas, serta penyandang disabilitas berat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang suatu kelompok, menggambarkan mekanisme proses atau hubungan tertentu, memberikan gambaran lengkap dalam bentuk kata-kata atau angka, memberikan informasi dasar tentang suatu hubungan, serta menciptakan kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang dikatakan oleh Lofland dan Lofland yang dikutip Moleong (2007:157) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu "Sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain." Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
2. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. (Uber Silalahi, 2012:291)

Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan. Dalam hal ini implementasi program keluarga harapan diamati dari beberapa unsur menurut model implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Informan Penelitian

Menurut Sugiono (2014:221) Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian, Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang relevan. Informan dalam penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang berarti informan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian dan dengan memilih narasumber yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti.

1. Koordinator PKH Kabupaten : 1 orang
2. Koordinator PKH Kecamatan : 1 orang
3. Pendamping PKH Kecamatan : 1 orang
4. Masyarakat Penerima PKH : 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka

Validasi Data

Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. (Sugiyono, 2011:90) Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (Uber Silalhi, 2012:339). Analisis data tersebut terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada intinya fungsi implemntasi yaitu sinkronisasi tujuan kebijakan dengan hasil kegiatan dilapangan. Maka untuk mengkaji lebih akurat suatu implementasi kebijakan publik yang memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

Komunikasi

Dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng yang dilakukan oleh pendamping menyampaikan secara cermat kepada peserta PKH, hal ini ditunjukan setiap pertemuan yang dilakukan sebulan sekali peserta PKH terlihat memahmai apa yang disampaikan Pendamping PKH, ditambah penejelasan oleh pendamping PKH mengenal bidang kesehatan dan pendidikan dijelaskan secara rinci mengunkan pilihan kata yang mudah

dipahami oleh para peserta PKH itu sendiri. Usaha pendamping PKH berusaha untuk menyampaikan pesan sejelas mungkin kepada peserta PKH untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami inti dari pesan yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Bojonggenteng indikator komunikasi sesuai hasil penelitian sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH, dapat dibuktikan dalam pelaksanaan kebijakan PKH, materi dan komunikasi yang disampaikan pendamping PKH yang diberikan pertemuan kelompok yang dilakukan satu bulan sekali telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH. Topik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi materi yang selalau di informasikan saast pertemuan kelompok, dan setiap sebelum kegiatan dimulai pendamping selalau menyesuaikan informasi yang akan disampaikan dengan pedoman pelaksanaan PKH. Informasi yang disampaikan kepada peserta PKH selau konsisten dan tepat dengan menggunakan pedoman pelaksanaan PKH.

Dalam hasil wawancara dengan informan mengenai komunikasi dalam implimentasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojonggenteng dilakukan satu bulan sekali merekonsiliasi tentang program PKH dengan peserta PKH, begitu juga komunikasi dengan unit-unit lain seperti komunikasi ke unit Desa dan Kecamatan. Meskipun keterlibatan unit-unit lain hanya sedikit dilibatkan dalam implimentasi program keluarga harapan, untuk komunikasi dalam Implimentasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng sudah cukup baik dari semua unit pelaksana program PKH di Kecamatan Bojonggenteng. Tetapi para pendamping PKH mempunyai keterbatasan dalam mengsosialisasikan program PKH, karna itu bukan wewenang mereka, karna

tugas fungsi para pendamping PKH hanya mendampingi saja.

Sumberdaya

Pembahasan penelitian pada dimensi sumberdaya mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng ialah pendamping PKH sebagai tim pelaksana yang direkrut langsung oleh Kementerian Sosial RI dengan persyaratan yang ditetapkan bahkan pendamping PKH ialah termasuk orang terpilih melalui seleksi yang ketat dan tentunya harus mempunyai intelektual yang sangat baik untuk menjadi tim pelaksana PKH tentunya berkompeten dalam implementasi kebijakan PKH, hal ini ditunjukkan bahwa implementasi berusaha secara maksimal agar tujuan dari kebijakan ini bisa sesuai tujuan yang ditetapkan yaitu mengsejahterakan masyarakat. Segala kemampuan yang dimiliki oleh pendamping digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan kebijakan. Pendamping PKH memiliki pengetahuan yang cukup luas yang terlihat saat memberikan informasi, ataupun memberikan motivasi kepada peserta PKH. Selain itu pendamping PKH bersedia menerima pengaduan tentang permasalahan yang terjadi saat pelaksana PKH dan permasalahan yang dialami para peserta PKH. Dari pelaksanaan indikator sumberdaya, berdasarkan. Penelitian bahwa sumberdaya yang perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus berinovasi untuk melayani para peserta PKH, ditambah saat pandemik ini, masyarakat, khususnya peserta PKH mengharapkan sekali bantuan dari pemerintah.

Sumber Daya Manusia dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojonggenteng, Sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai pedoman pelaksanaan program PKH. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendamping Program Keluarga

Harapan (PKH) memiliki kompetensi yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan PKH. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Bojonggenteng, pendamping PKH berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendamping memiliki pengetahuan yang luas, yang terlihat saat memberikan masukan kepada peserta PKH. Mereka juga memiliki keterampilan dalam memfasilitasi pertemuan dengan peserta PKH, serta mampu menguasai materi dan mengajak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pertukaran pengalaman. Selain itu, pendamping PKH juga bersedia menerima pengaduan terkait masalah yang dihadapi oleh peserta PKH.

Dari hasil penelitian mengenai indikator sumber daya, ditemukan bahwa ketersediaan fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH masih belum memadai. Fasilitas yang digunakan dalam implementasi kebijakan PKH belum optimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Kekurangan fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH terlihat dari penggunaan tempat yang tidak optimal serta kekurangan peralatan yang diperlukan dalam penyampaian materi saat pertemuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga (P2K2).

Disposisi

Pada dimensi disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng lebih mengfokuskan kepada pendamping PKH. Dalam pertemuan kelompok yang dilakukan satu bulan sekali antara pendamping PKH dan peserta PKH. Pendamping PKH selalu bersikap sopan

dan ramah terhadap peserta PKH, hal ini terlihat saat pertemuan kelompok, peserta PKH dan pendamping PKH selalu bisa menghargai satu sama lain sehingga dalam pertemuan kelompok jauh dari ketegangan ataupun persilishan.

Dalam pertemuan kelompok pendamping PKH senantiasa memberikan dukungan emosional kepada peserta PKH dengan memberikan motivasi yang mampu memberikan dampak positif bagi mereka. Pendamping PKH selalu terus memberikan motivasi terus terpacu Melalui dorongan dan motivasi yang diberikan oleh PKH, terjadi peningkatan dalam kualitas kehidupan peserta PKH.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojonggenteng, disposisi pendamping PKH terhadap peserta PKH menunjukkan sikap yang sopan dan menghargai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH telah menjalankan tugas dengan baik dalam bersikap sopan terhadap peserta PKH. Sikap saling menghargai antara pendamping dan peserta PKH menjadi faktor penting yang menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta PKH dalam mengikuti program ini.

Dalam praktik implementasi Program Keluarga Harapan, pendamping PKH memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta PKH. Mereka tidak hanya memberikan informasi dan pelatihan, tetapi juga membangun hubungan yang bersifat saling menghargai dan saling mendukung dengan peserta PKH. Sikap sopan dan saling menghargai ini membantu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung dalam mencapai tujuan program PKH, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup peserta PKH. Dengan slogan yang selalu menjadi acuan yang dalam bertugas yaitu SIP, Santun, Integritas, dan Profesional, yang selanjutnya meliputi dukungan

moril dari pendamping PKH terhadap peserta PKH, pendamping PKH selalu memberikan dukungan moril berupa motivasi yang dapat memberikan dampak positif bagi peserta PKH. Pemberian motivasi terus dilakukan agar setiap peserta PKH dapat terus terpicu dengan motivasi yang diberikan pendamping PKH sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para peserta PKH.

Struktur Birokrasi

Pada dimensi struktur birokrasi dengan indikator adanya koordinasi antara pendamping PKH dengan unit-unit pelaksana program PKH, dengan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng. Dari hasil observasi peneliti koordinasi dari pendamping PKH dengan kordinator PKH dengan unit-unit pelaksana program PKH dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya sasaran kerjasama dalam menentukan kebijakan PKH, misalnya dalam menentukan masyarakat yang layak menjadi peserta PKH dengan ditunjukannya data dari pendamping PKH. Dalam Implementasi kebijakan PKH koordinasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilaksanakan, supaya Implementasi Kebijakan PKH berjalan dengan lancar.

Dari pelaksanaan indikator struktur menurut hasil wawancara informan bahwa birokrasi yang selanjutnya meliputi adanya kerjasama antara pendamping PKH, Instrumen Pemerintah dan peserta PKH dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari hasil observasi paneliti peserta PKH selalu menunjukan kepuasan atas program PKH dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Bojonggenteng, ditemukan bahwa koordinasi antara pendamping

PKH dan Kasi Sosial dan Budaya dilaksanakan dengan cukup baik. Terdapat kerjasama dalam menentukan sasaran kebijakan PKH, pemilihan peserta PKH, dan transparansi data antara Kasi Sosial dan Budaya dengan pendamping PKH.

Koordinasi yang efektif antara pendamping PKH dan Kasi Sosial dan Budaya menjadi faktor penting dalam menjalankan program PKH secara efisien. Melalui kerjasama dan koordinasi yang baik, pendamping PKH dapat memperoleh informasi yang relevan dari Kasi Sosial dan Budaya, seperti data dan pemahaman mengenai kondisi sosial dan budaya di wilayah Kecamatan Bojonggenteng. Hal ini membantu pendamping PKH dalam mengidentifikasi dan memilih masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta PKH, sehingga program PKH dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, transparansi dalam pertukaran data antara Kasi Sosial dan Budaya dengan pendamping PKH menjadi penting dalam memastikan akurasi dan keandalan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan PKH. Transparansi ini memungkinkan pendamping PKH untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait kebutuhan dan potensi peserta PKH, sehingga dapat memberikan bantuan yang sesuai dan efektif.

Dengan demikian, koordinasi yang baik antara pendamping PKH dan Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Bojonggenteng merupakan faktor penting dalam menjalankan implementasi kebijakan PKH dengan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan kebijakan PKH, koordinasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Tanpa adanya koordinasi yang efektif antara pendamping PKH dan kasi

kesejahteraan, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar. Pendamping PKH membutuhkan data yang relevan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, dan kasi kesejahteraan berperan dalam menyediakan informasi tersebut. Selain itu, kerjasama antara pendamping PKH dan peserta PKH juga merupakan bagian dari struktur birokrasi yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan PKH.

Dalam konteks implementasi kebijakan PKH, koordinasi antara pendamping PKH dan kasi kesejahteraan menjadi kunci penting. Kasi kesejahteraan memiliki akses terhadap data dan informasi terkait kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan adanya koordinasi yang baik, pendamping PKH dapat memperoleh data yang akurat dan terkini, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam memilih dan membantu peserta PKH.

Selain itu, kerjasama antara pendamping PKH dan peserta PKH juga penting dalam mencapai tujuan kebijakan PKH. Pendamping PKH perlu menjalin hubungan yang baik dengan peserta PKH, memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mereka, serta memberikan dukungan yang sesuai. Melalui kerjasama yang baik antara pendamping PKH dan peserta PKH, implementasi kebijakan PKH dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, koordinasi antara pendamping PKH dan kasi kesejahteraan serta kerjasama antara pendamping PKH dan peserta PKH merupakan aspek penting dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan PKH.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait indikator struktur birokrasi, ditemukan bahwa implementasi kebijakan PKH telah

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua kegiatan yang terkait dengan implementasi kebijakan PKH telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan tersebut mengikuti pedoman pelaksanaan PKH yang telah ditetapkan. Pendamping PKH menjalankan kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, serta mengadaptasikan kegiatan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Implementasi kebijakan PKH yang sesuai dengan SOP merupakan hal penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan program. Dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, pendamping PKH dapat menjalankan kegiatan dengan lebih efisien dan efektif. SOP memberikan panduan yang jelas tentang tindakan yang harus dilakukan, prosedur yang harus diikuti, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengimplementasikan kebijakan PKH. Hal ini membantu dalam menjaga keseragaman dan kualitas pelaksanaan kebijakan PKH di berbagai wilayah.

Pendamping PKH juga fleksibel dalam menjalankan kegiatan, mengikuti agenda yang telah ditetapkan, namun juga mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta PKH. Pendamping PKH memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kegiatan dengan perubahan situasi yang mungkin terjadi, sehingga implementasi kebijakan PKH tetap berjalan dengan baik meskipun ada faktor kondisional yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH dalam hal struktur birokrasi telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh adanya pedoman pelaksanaan PKH yang menjadi acuan bagi pendamping PKH dalam menjalankan kegiatan sesuai

dengan agenda yang telah ditentukan, serta fleksibilitas pendamping dalam menghadapi situasi kondisional yang mungkin terjadi.

Dalam pelaksanaan kebijakan PKH, koordinasi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Tanpa adanya koordinasi yang efektif antara pendamping PKH dan kasi kesejahteraan sosial dan budaya, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Kasi kesejahteraan sosial dan budaya memiliki peran penting dalam menyediakan data yang diperlukan oleh pendamping PKH di tingkat desa, terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pendamping PKH dan kasi kesejahteraan sosial dan budaya menjadi bagian dari struktur birokrasi yang harus dijaga.

Dalam implementasi kebijakan PKH, koordinasi yang baik antara pendamping PKH dan kasi kesejahteraan sosial dan budaya menjadi kunci keberhasilan. Kasi kesejahteraan sosial dan budaya menyediakan data dan informasi yang relevan untuk pendamping PKH dalam memilih dan membantu peserta PKH. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak memungkinkan pertukaran informasi yang penting untuk menjalankan program PKH secara efektif.

Selain itu, kerjasama antara pendamping PKH dengan peserta PKH juga penting dalam implementasi kebijakan PKH. Pendamping PKH perlu menjalin hubungan yang baik dengan peserta PKH, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai. Melalui kerjasama yang erat, implementasi kebijakan PKH dapat berjalan dengan lebih baik dan peserta PKH dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara pendamping PKH dan kasi kesejahteraan sosial dan budaya, serta kerjasama antara pendamping PKH dan peserta PKH,

merupakan komponen penting dalam struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan PKH.

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa implementasi kebijakan PKH yang melibatkan struktur birokrasi telah dilaksanakan dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua kegiatan yang terkait dengan implementasi kebijakan PKH telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan PKH didasarkan pada pedoman pelaksanaan PKH yang telah ada. Pendamping PKH menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, serta menyesuaikan dengan kondisi yang bersifat kondisional.

Implementasi kebijakan PKH yang mengacu pada SOP merupakan hal penting dalam memastikan konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan program. Dengan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan, pendamping PKH dapat menjalankan kegiatan dengan lebih teratur dan terarah. SOP memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil, prosedur yang harus diikuti, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan PKH. Dengan adanya SOP yang berlaku, kualitas pelaksanaan kebijakan PKH dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten.

Pendamping PKH juga memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan, sambil tetap mampu menyesuaikan dengan kondisi kondisional yang mungkin timbul. Pendamping PKH memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil langkah yang tepat menghadapi perubahan situasi yang mungkin terjadi, sehingga implementasi kebijakan PKH tetap berjalan dengan baik meskipun ada faktor kondisional yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH yang melibatkan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan dalam implementasi kebijakan PKH telah dilakukan dengan mematuhi pedoman yang ada, serta pendamping PKH dapat menyesuaikan kegiatan dengan agenda yang telah ditentukan dan menghadapi situasi kondisional yang mungkin terjadi.

Konsep Program Keluarga Harapan

PKH, yang merupakan singkatan dari Program Keluarga Harapan, adalah program pemberian bantuan sosial dengan syarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan lebih cepat. Sejak tahun 2007, PKH telah dilaksanakan sebagai salah satu Program Perlindungan Sosial di Indonesia. Program serupa yang dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) juga telah terbukti berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan di berbagai negara, terutama dalam mengatasi kemiskinan yang bersifat kronis.

PKH merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan membutuhkan bantuan. Program ini mengharuskan KPM untuk memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, seperti keterlibatan dalam program kesehatan dan pendidikan, guna menerima manfaat yang disediakan oleh PKH. Dengan adanya bantuan sosial bersyarat ini, diharapkan dapat membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta memberikan dorongan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang terus berlanjut.

Pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan bahwa program-program serupa yang menerapkan prinsip Conditional Cash Transfers (CCT) telah memberikan dampak yang positif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program PKH di Indonesia juga terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam hal implementasi, pemantauan, dan evaluasi, guna memastikan manfaat yang diberikan kepada KPM sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Meskipun fakta dilapangan menemukan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Bojonggenteng seperti masih adanya kurangnya sosialisasi dan kesenjangan sosial sehingga menyebabkan konflik kecemburuan antara masyarakat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga sering terjadi miskomunikasi masyarakat awam terhadap pendamping PKH, tetapi Sebagai program bantuan sosial dengan syarat, PKH memberikan kesempatan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk mengakses berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa PKH memiliki manfaat yang signifikan, dan saat ini upaya diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia, dengan tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, peserta PKH didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan berbagai layanan sosial dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. Selain itu, PKH juga memberikan akses peserta PKH ke berbagai program perlindungan sosial lainnya yang saling melengkapi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk

menciptakan sinergi antara program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional, dengan PKH sebagai episentrum dan pusat keunggulan dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam penelitian sebelumnya, telah ditemukan bahwa PKH memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses peserta PKH terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga miskin, dan mengurangi tingkat kemiskinan kronis. PKH juga membantu dalam memberikan pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga miskin, termasuk melalui program-program perlindungan sosial lainnya yang terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, PKH memiliki peran penting dalam membuka akses dan memberikan manfaat kepada keluarga miskin, khususnya ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Program ini juga menjadi episentrum dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan dilapang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dari itu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka tingkat kepuasan peserta PKH mengenai program PKH sangat baik, belum lagi setiap tahunnya peserta PKH di Kecamatan Bojonggenteng terus bertambah;
2. Konsep Program PKH di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi merupakan program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima (KPM)

yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam pelaksanaan program PKH masih ada faktor-faktor pengambat seperti sosialisasi dan kesenjangan sosial sehingga program keluarga harapan di Kecamatan Bojonggenteng kurang efektif.

SARAN

1. Perlu adanya pemutakhiran data secara benar sebagai bentuk proses pendataan peserta penerima PKH di Kecamatan Bojonggenteng. Hal tersebut untuk mengurangi masyarakat yang semestinya terdaftar sebagai peserta PKH, yang memicu kecemburuan sosial sehingga memicu konflik diantara masyarakat.
2. Tim pendamping PKH seharusnya mengadakan sosialisasi program PKH tidak hanya kepada peserta PKH, tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti tokoh Masyarakat, LSM, ORMAS, dan Masyarakat luas. sehingga program PKH akan mendapat pasrtispasi masyarakat yang baik. Pendamping PKH perlu melakukan pengawasan dan memberi pemahaman kepada peserta PKH agar dan tunai yang diterima dari program PKH bisa benar-benar digunakan sesuai ketentuan PKH, dan para stakeholder untuk turut serta mengawasi dan mendorong agar implementasi agar berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku pedoman PKH, 2019Bungin,

Implemntasi Program Kelurga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi

- Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, Abu Bakar. 2019. Efektifitas Program Pelatihan keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kusuma Dewi R. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung : Pustaka Setia
- Maimun Sholeh.2020. Pengaruh Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Modal Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, 12
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rusliandy. 2020. Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, 12
- Silalahi ,Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subagyo P Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyastuti, Astriana. 2012. Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009, 20